



Menakar Keadilan Fiskal: Kontribusi Ekonomi dan Feedback Pembangunan untuk Luwu Raya Selama 80 Tahun Indonesia Merdeka

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Luwu Raya—yang terdiri atas Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo—merupakan kawasan strategis di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan. Sejak era kemerdekaan, wilayah ini dikenal sebagai lumbung sumber daya alam dan pusat perlawanan terhadap penjajahan. Namun, meski memberikan kontribusi ekonomi yang besar bagi negara, pembangunan infrastruktur, kualitas SDM, dan kapasitas fiskal di kawasan ini belum menunjukkan keseimbangan yang adil.

Menyongsong HUT ke-80 Republik Indonesia, muncul urgensi untuk merefleksikan kembali posisi strategis Luwu Raya dalam kerangka pembangunan nasional dan wacana pemekaran daerah menjadi Provinsi Luwu Raya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar kontribusi ekonomi Luwu Raya terhadap negara dalam delapan dekade terakhir?
2. Bagaimana tingkat feedback fiskal dan pembangunan yang diterima daerah ini?
3. Apakah pemekaran menjadi provinsi merupakan solusi strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Luwu Raya?

1.3. Tujuan

- Menghitung kontribusi ekonomi riil Luwu Raya terhadap nasional
- Menganalisis proporsi alokasi fiskal dan pembangunan yang diterima
- Memberikan rekomendasi strategis berbasis data dan sejarah

II. TINJAUAN UMUM LOKASI DAN POTENSI WILAYAH

2.1. Wilayah Administratif

Luwu Raya mencakup empat daerah:

- Kabupaten Luwu (Ibu Kota: Belopa)
- Kota Palopo (eks ibu kota Luwu)
- Kabupaten Luwu Utara (Masamba)
- Kabupaten Luwu Timur (Malili)



2.2. Potensi Ekonomi

- **Tambang Nikel (PT Vale Indonesia Tbk) di Sorowako – Luwu Timur:**

Produksi 2023 mencapai 70.728 metrik ton nikel matte (Vale, 2023).
Estimasi nilai ekspor > USD 1,2 miliar atau setara Rp18 triliun.

- **Pertanian dan Perkebunan:**

Luwu Raya adalah sentra kakao terbesar di Sulsel dan termasuk lima besar nasional (BPS Sulsel, 2022).

- **PDRB (2023):**

- Luwu Timur: Rp28,9 triliun
- Luwu Utara: Rp17,8 triliun
- Luwu: Rp21,4 triliun
- Palopo: Rp8,7 triliun
- Total: ±Rp76,8 triliun**

- **Industri dan Jasa:**

Palopo berkembang sebagai simpul jasa pendidikan dan perdagangan.

III. KONTRIBUSI FISKAL VS FEEDBACK PEMBANGUNAN

3.1. Dana Transfer ke Daerah (2024)

Kabupaten/Kota	DAU + DBH 2024
Luwu Timur	Rp1,12 T
Luwu	Rp820 M
Luwu Utara	Rp710 M
Palopo	Rp300 M
Total	Rp2,95 T

Sumber: Kemenkeu RI (APBN 2024)

3.2. Kesenjangan Keadilan Fiskal

Jika dibandingkan dengan estimasi kontribusi ekonomi wilayah (±Rp76,8T) dan nilai ekspor tambang (±Rp18T), maka *feedback fiskal* < 4% dari total kontribusi.



3.3. Infrastruktur dan SDM

- Minim infrastruktur strategis nasional: tidak ada tol, bandara kelas internasional, atau pelabuhan laut dalam.
- Angka partisipasi kasar perguruan tinggi (APK PT) masih di bawah 25% (BPS Lutim, 2022).

IV. FONDASI SEJARAH DAN IDENTITAS LOKAL

4.1. Peran Sejarah Luwu

- **Andi Djemma**, Datu Luwu, merupakan tokoh kunci kemerdekaan di Sulsel dan diakui sebagai Pahlawan Nasional.
- **Opu Daeng Risaju**, pejuang perempuan dari Luwu, juga diakui sebagai Pahlawan Nasional.

4.2. Identitas Kultural dan Budaya

Kawasan Luwu Raya memiliki basis budaya yang kuat dan homogenitas etnis yang menjadi modal sosial untuk menjadi provinsi baru.

V. ANALISIS STRATEGIS: PEMEKARAN SEBAGAI JALAN TENGAH

5.1. Alasan Strategis Pemekaran

- Meningkatkan efisiensi alokasi anggaran dan pembangunan sektoral
- Memberikan kekuatan politik dan representasi daerah di pusat
- Meningkatkan kontrol lokal atas sumber daya ekonomi

5.2. Komparasi dengan Provinsi Baru Lainnya

- Provinsi Sulawesi Barat (dibentuk 2004) dengan PDRB awal < Rp10T kini tumbuh 3x lipat
- Provinsi Kalimantan Utara juga menunjukkan peningkatan signifikan sejak dimekarkan (2012)

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

- Luwu Raya memberikan kontribusi ekonomi nasional yang sangat besar, khususnya melalui tambang dan pertanian.
- Feedback pembangunan yang diterima sangat tidak seimbang, baik dari sisi fiskal maupun infrastruktur.



- Pemekaran menjadi Provinsi Luwu Raya adalah langkah strategis yang layak didorong demi keadilan dan percepatan pembangunan.

6.2. Rekomendasi

1. Penguatan kajian akademik dan penyusunan naskah akademik pemekaran provinsi Luwu Raya
2. Konsolidasi elite politik dan tokoh masyarakat Luwu Raya untuk advokasi formal ke DPR RI dan Kemendagri
3. Kampanye berbasis data dan sejarah melalui media, forum daerah, organisasi paguyuban dan agenda perayaan HUT RI ke-80

DAFTAR PUSTAKA

- *Badan Pusat Statistik. (2023). Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka.*
- *PT Vale Indonesia Tbk. (2024). Laporan Tahunan 2023.*
- *Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Buku II APBN 2024.*
- *Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). (2022). Kajian Pemekaran Wilayah.*
- *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*